

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dianalisis melalui aspek dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, pelaksanaan program Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS) di Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo dilakukan dengan mendorong kearifan lokal yang ada di masyarakat.
2. Transmisi komunikasi pelaksanaan program terbagi menjadi dua yaitu; penginformasian yang mendorong fleksibilitas pada 6 jenjang jaringan; dan pelaporan sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan program.
3. Kualitas pelaksana kompeten namun secara kuantitas memiliki keterbatasan pada jumlah pengisi jabatan fungsional di tingkat kemantren dan tingkat kelurahan.
4. Kognisi yang sangat positif didukung dengan optimisme pelaksana pada capaian dan keberlanjutan program Mas JOS.
5. Mekanisme pelaksanaan dan pembagian tugas pelaksana program secara formal sebatas pada SE Walikota tahun 2025 tentang Mas JOS, dan pelaksanaan di Kemantren Umbulharjo dilakukan dengan mendorong kearifan lokal yang terbukti efektif mencapai target dalam program yaitu pengurangan timbulan sampah dari sumbernya.
6. Pemberdayaan masyarakat menjadi solusi kompleksitas demografi dan geografi di Kemantren Umbulharjo.

4.2 Saran

Melihat dari serangkaian hambatan dalam pelaksanaan program Mas JOS di Kemantren Umbulharjo, berikut ini adalah rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi Pemerintah Kemantren Umbulharjo maupun Pemerintah Kota Yogyakarta dan DLH dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah:

1. Penerapan sistem insentif dan *punishment* berbasis akuntabilitas kader memiliki dua sisi implikasi yang berjalan secara bersamaan. Yaitu apresiasi bagi kader yang memenuhi target dan mekanisme sanksi bagi kader yang tidak aktif.
2. Diperlukan penyesuaian skala prioritas anggaran di tingkat kemantren melalui penerapan prinsip penganggaran progresif yang mengalokasikan sumber daya secara proporsional terhadap kompleksitas wilayah.
3. Setiap metode pengelolaan sampah harus diinkubasi dalam waktu yang cukup untuk diuji, dievaluasi capaiannya, dan dioptimalkan sesuai kapasitas pelaksana di tingkat paling bawah.
4. Penyusunan sistem pengangkutan sampah yang dapat dintegrasikan secara penuh pada sistem Mas JOS sehingga tidak ada lagi celah institusional yang memungkinkan masyarakat mengalihkan pelaksanaan pemilahan sampah kepada penggerobak yang tidak terafiliasi DLH.

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Lebih dari itu, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kemantren Umbulharjo untuk terus berkomitmen dalam menerapkan langkah yang strategis demi mengatasi problematika implementasi pengelolaan sampah di wilayahnya.